Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024: Lembaga Penegak Keadilan atau Arena Kepentingan Politik?

**Mega Arinda Pramessella^{1*}, Najwa Adhwa Ramadhani²,
Alifah Jasmine Kallista Remanu³, Bella Ola Shakira⁴,
Achmad Aidil Viqri⁵, Restu Rahmawati⁶**

¹⁻⁶Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta, Indonesia

Email: 2310413050@mahasiswa.upnvj.ac.id^{1*}, 2310413051@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310413061@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310413069@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴,
2310413005@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, restu.rahmawati@upnvj.ac.id⁶

Abstrak. Pemilihan presiden 2024 menjadi momentum tepat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi guna mewujudkan prinsip demokrasi. Namun dalam implementasinya, banyak sekali kecurigaan masyarakat dalam proses pemilihan umum yang jujur dan adil. Mulai dari proses pencalonan hingga kepada hasil perhitungan suara yang dimenangkan oleh salah satu paslon yang dianggap cacat oleh masyarakat karena mengutamakan kepentingan politik mereka sehingga dua paslon lainnya melakukan pengajuan sengketa hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk mengetahui peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2024. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak sengketa tersebut dengan alasan tidak berdasar. Padahal, terdapat *dissenting opinion* yang seharusnya permohonan tersebut dapat dikabulkan. Dengan hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi kehilangan legitimasinya sebagai pelindung hukum dan juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Presiden, Sengketa

Abstract. The 2024 presidential election is the right moment for all Indonesians to participate in realizing the principles of democracy. However, in its implementation, there is a lot of public suspicion in an honest and fair election process. Starting from the nomination process to the results of the vote count won by one of the pairs of candidates who are considered defective by the community because they prioritize their political interests so that the other two pairs of

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

candidates submit election result disputes to the Mahkamah Konstitusi to save Indonesian democracy. The purpose of researchers conducting research is to find out the role of the Mahkamah Konstitusi in resolving disputes over the 2024 presidential election. The research method used uses a qualitative approach by analyzing data from literature studies. The results showed that the Mahkamah Konstitusi rejected the dispute on the grounds that it was unfounded. In fact, there is a dissenting opinion that the application should be granted. This shows that the Mahkamah Konstitusi has lost its legitimacy as a legal protector and can also reduce public trust in legal institutions in Indonesia.

Keywords: *Mahkamah Konstitusi, Presidential Election, Dispute*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah proses demokrasi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan mengutamakan hak warga dalam pemberian suara. Pemilu merupakan syarat mutlak bagi negara demokrasi, yang bertujuan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pemilu yang bersih dan transparan mampu memberikan kesempatan besar untuk warganya agar dapat terlibat dalam proses politik, budaya politik memainkan peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi di tengah Masyarakat.¹ Selain itu, proses pemilu dijalankan sesuai dengan nilai demokrasi dan asas luberjurdil yang diatur dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945, agar mampu memberikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Pasal tersebut juga menekankan untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi². Pemilu 2024 merupakan salah satu pemilu yang dianggap kontroversial karena dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas dan kredibilitas pemilu itu sendiri. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi berupa permasalahan administratif, dugaan kecurangan, sampai penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Pelanggaran tersebut mulai terjadi di tengah proses pelaksanaan pemilu sehingga menimbulkan reaksi ketidakpuasan dari pemilih. Dengan adanya hal tersebut, diperlukan

¹ Laventia, F., Faizal, A., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Politik di Era Digital: Media Sosial sebagai Katalis atau Distorsi?. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 423-427.

² Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26.

penggunaan mekanisme yang sah secara hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawal jalannya konstitusi dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan peradilan guna menjaga stabilitas konstitusi sebuah negara serta menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) setidaknya memiliki empat kewenangan yang diatur dalam UUD 1945 yang memiliki wewenang pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat final untuk: 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan penuh oleh Undang-Undang Dasar; 3) memutuskan atas pembubaran dari partai politik; dan 4) memutuskan atas perselisihan tentang hasil pemilihan umum³. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam pemilihan umum, di mana berbagai dinamika terjadi pada pemilu yang menyebabkan munculnya perselisihan hukum terkait proses pemilihan umum itu sendiri sehingga harus melibatkan peran dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri⁴. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga independen memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan terkait sengketa pemilihan umum yang berdasarkan pada konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Jika mengamati lebih mendalam, peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia sangat vital untuk menyelesaikan perkara yang erat dalam masalah politik khususnya pada pemilihan umum. Dalam beberapa tahun belakangan, perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi terbanyak pada Pemilu 2014 yang terdapat 702 kasus mengenai perselisihan hasil pemilu legislatif, yang mana terjadi peningkatan jumlah dibandingkan pada Pemilu 2004 dengan 274 kasus perkara dan Pemilu 2009 dengan 627 perkara⁵. Selain itu,

³ Mahkamah Konstitusi RI. (2024). *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, Diakses pada 23 Maret 2025.

⁴ Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara: (Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13-13.

⁵ Almalibari, K. T., Aziz, A., & Febriansyah, A. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1-8.

fenomena Pilpres 2024 kemarin juga sempat membuat adanya huru-hara masyarakat publik, yang dalam implementasinya, banyak terjadi pelemahan demokrasi dalam proses pelaksanaan pemilihan umum mulai dari tahap registrasi calon peserta hingga pada penyelesaian sengketa pemilihan umum.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, dalam Pemilihan Presiden 2024 telah menjadi isu hangat yang memicu berbagai reaksi publik. Tidak sedikit pihak yang beranggapan bahwa keikutsertaan Gibran adalah upaya melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi melalui jalur politik, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan praktik nepotisme dalam sistem demokrasi Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengemukakan bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan dan intervensi politik karena ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, adalah paman Gibran. Keputusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fungsi MK sebagai lembaga yang seharusnya menjaga konstitusi secara independen dan bebas dari kepentingan politik. Hal ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis demokrasi, dan partai politik oposisi. Meskipun kontroversi terkait putusan MK dan pencalonan Gibran terus bergulir, pasangan Prabowo-Gibran tetap melangkah maju dalam kontestasi politik dengan dukungan dari berbagai pihak. Hal ini tercermin dalam respons publik terhadap video pidato pasca pendaftaran capres-cawapres mereka, yang mendapatkan 28% komentar negatif dan 78% komentar positif⁶. Setelah pemungutan suara selesai, pasangan calon nomor urut 1 dan 3 mengajukan sengketa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempersoalkan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk indikasi ketidaknetralan aparat negara serta penyalahgunaan program bantuan

⁶ Wasisto, A., & Pahlevi, I. (2024). Dampak Perbedaan Partisan Terhadap Tingkat Disafeksi Politik di Media Sosial: Studi Kasus Pencalonan Gibran Rakabuming [The Impact of Partisan Difference on Political Disaffection Levels on Social Media: A Case Study of Gibran Rakabuming's Candidacy]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 15(1), 21-39.

sosial untuk kepentingan elektoral. Proses persidangan di MK kembali menjadi sorotan publik karena menempatkan lembaga tersebut dalam posisi krusial untuk menjaga integritas pemilu dan menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap praktik demokrasi yang adil dan transparan.

Teori yang digunakan diambil dari teori legitimasi dari Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Economy and Society* tahun 1992. Pada ilmu sosial dan politik Barat, legitimasi merujuk pada pengaturan kelembagaan yang mendorong warga negara mengungkapkan kepentingan mereka kepada pemangku kekuasaan politik⁷. Weber mengemukakan tiga tipe murni legitimasi otoritas, yaitu Legitimasi Tradisional yang berlandaskan adat dan kebiasaan historis, Legitimasi Karismatik yang bersumber dari pengaruh pribadi pemimpin, dan Legitimasi Legal-Rasional yang muncul atas sistem hukum yang sah dan diterima secara umum⁸. Legitimasi adalah bentuk hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin yaitu masyarakat terhadap kewenangan moral yang dimiliki seorang pemimpin untuk menjalankan, menetapkan, serta menegakkan keputusan-keputusan politik⁹. Legitimasi penting bagi keberlangsungan pemerintah dalam Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diakui dan dipercaya oleh publik untuk menjalankan keadilan. Dalam kasus pilpres 2024, dugaan nepotisme dan konflik kepentingan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dapat merusak legitimasi MK sebagai lembaga penegak hukum, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Penelitian terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pilpres memiliki urgensi yang sangat besar, mengingat fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu sebagai penjaga stabilitas konstitusi. Sebagai pendukung pada penelitian ini, penelitian berjudul “Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara” oleh Silvi Aryana Paradita & Irwan Triadi tahun 2024 membahas analisis perubahan pada putusan

⁷ Firmansyah, A., dkk, (2014). *Ilmu Negara: Dalam Kajian Interdisipliner*. Yogyakarta: PT. Narasikita Publishing.

⁸ Mulianto, B., & Fikri, R. (2018). Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(1), 520-532.

⁹ Ningrum, D. I. P. (2018). Legitimasi Negara Atas Mahasiswa Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori: Kajian Max Weber. *Jurnal Sapala*, 5(1), 1-11.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemilu 2024 dengan pendekatan hukum tata negara. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada topik yang membahas persepsi masyarakat dalam Pemilu Presiden tahun 2024 terhadap Mahkamah Konstitusi. Adapun penelitian berjudul “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi” oleh Rasji, Simbolon & Kasslim pada tahun 2024 yang membahas regulasi penanganan sengketa hasil pemilihan presiden, tantangan yang dihadapi, serta proses penyelesaian sengketa PPU Pilpres tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi. Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus dalam penelitian dimana kedua penelitian ini membahas bagaimana netralitas dan transparansi sebagai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin keadilan, integritas, dan legitimasi pada proses demokrasi di Indonesia.

Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu, MK berada di pusat perhatian publik, terutama terkait dengan integritas, netralitas, dan transparansinya dalam menjalankan fungsi konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dengan fokus pada aspek netralitas dan transparansi lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana dinamika penyelesaian sengketa Pilpres 2024 berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dasar pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif juga mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan melakukan deskripsi terhadap kenyataan secara benar dengan dibentuknya kata-kata berdasarkan teknik

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

pengumpulan data dan analisis data yang relevan¹⁰. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang ditangkap peneliti dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada¹¹. Dalam hal ini, yang menjadi pokok bahasan pada artikel ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi pada Pilpres 2024 kemarin, di mana Mahkamah Konstitusi dipertanyakan mengenai kredibilitasnya dan dianggap tidak netral dalam Pilpres 2024. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain seperti artikel, jurnal, berita maupun literatur yang relevan dengan topik penelitian¹². Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono, triangulasi data adalah suatu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan data yang telah ada.¹³ Menurut Wijaya, triangulasi data merupakan teknik membandingkan data dari berbagai sumber yang ada dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda.¹⁴ Pada penelitian ini, teknik triangulasi data yang digunakan dengan cara membandingkan beberapa literatur yang ada sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan diakui kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Polemik Pilpres 2024

Pemilihan presiden tahun 2024, dianggap sebagai pemilihan presiden yang dapat dikatakan sebagai pemilihan yang kurang demokratis. Berbagai polemik terjadi dalam pemilihan presiden tahun ini, mulai dari munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengemukakan bahwa seorang presiden atau wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk

¹⁰ Satori, D. & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

¹¹ Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

¹² Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

¹³ Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

¹⁴ Wijaya, H. (2018). *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Prof. Burhan Bungin).

kepala daerah¹⁵. Keputusan ini tentunya menimbulkan banyak tanda tanya di masyarakat mengenai kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Pasalnya, yang saat itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman, yang merupakan adik ipar sang presiden, Joko Widodo. Hal ini tentunya dianggap oleh masyarakat luas dengan adanya konflik kepentingan, yang mana saat itu, terdengar rumor bahwa Gibran Rakabuming akan diangkat menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Sampai akhirnya, pada minggu malam, 22 Oktober 2023, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto resmi mengumumkan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presidennya.

Polemik pada Pilpres 2024 tidak berhenti sampai saat itu saja, melainkan terus ada sampai penetapan hasil pemilihan umum bahkan sampai penyelesaian sengketa Pilpres 2024. Beberapa diantaranya seperti pembagian bantuan sosial (bansos) pangan beras dari Presiden Jokowi yang menuai kritikan, sebab kemasan beras tersebut ditempelkan stiker pasangan calon Prabowo-Gibran. Menurut analisis Majalah Tempo, kebijakan Presiden Jokowi dalam pemberian bantuan sosial disinyalir sebagai upaya untuk memberikan dukungan suara untuk putranya, Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan Prabowo Subianto¹⁶. Sampai akhirnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno pada 20 Maret 2024 yang digelar di Kantor KPU, melakukan penetapan hasil pemilihan umum bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024 setelah memperoleh 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen perolehan suara dari setengah jumlah provinsi di Indonesia¹⁷.

¹⁵Apriansyah, A., Marsuni, L., & Salmawati, S. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 827-845.

¹⁶Febiola, A. (2024). *Tim AMIN Kritik Bansos Jokowi Bergambar Paslon 02: Konsekuensi Jika Penguasa Ingin Berkuasa*. <https://www.tempo.co/ekonomi/tim-amin-kritik-bansos-jokowi-bergambar-paslon-02-konsekuensi-jika-penguasa-ingin-tetap-berkuasa-94276>. Diakses pada 13 April 2025.

¹⁷Muzaki, A. F. (2024). *KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024*. <https://rumahpemilu.org/kpu-resmi-tetapkan-prabowo-gibran-sebagai-pemenang-pilpres-2024/>. Diakses pada 11 April 2025.

Tentunya dalam penetapan hasil yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024 membuat pesaing paslon terpilih mendaftarkan gugatan sengketa atas perselisihan hasil pemilihan umum. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Perjalanan mereka dari tahap awal hingga akhir munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial karena menolak permohonan kedua paslon mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Sehari setelah penetapan hasil pemilihan presiden pada Kamis, 21 Maret 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin (AMIN) mendaftarkan PPHU Pilpres, yang juga menjadi pemohon pertama atas perkara sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Disusul dua hari kemudian, Sabtu, 23 Maret 2024, Tim Hukum Ganjar-Mahfud (GAMA) mendaftarkan sengketa Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, baik Tim AMIN dan Tim GAMA meminta petitum kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun mengecualikan Prabowo-Gibran didalamnya, atau setidaknya Prabowo didampingi oleh cawapres lainnya selain Gibran. Beberapa perkara yang diajukan oleh Tim Hukum AMIN adalah bukan berfokus kepada persoalan hasil, melainkan bagaimana proses pemilu yang terjadi¹⁸. Pokok persoalan yang dipermasalahkan baik dalam permohonan perkara Tim Hukum AMIN dan Tim Hukum GAMA dalam naskah gugatan adalah pencalonan wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming, yang merupakan putra dari Presiden Jokowi sehingga membawa dampak terhadap proses pemilu yang curang. Intervensi dari ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang juga merupakan paman dari Gibran Rakabuming, yang membantu melanggengkan proses pemilu yang tidak sesuai dengan asas demokrasi. Persoalan lainnya yang dibawa oleh Tim Hukum AMIN adalah pembagian bantuan sosial (bansos) yang masif oleh Presiden Jokowi, yang diduga memiliki niat terselubung untuk memenangkan putra sulungnya.

¹⁸ Purnamasari, D. D. (2024). *Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Hukum AMIN Desak Pemilu Ulang*. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/21/gugat-hasil-pilpres-ke-mk-tim-hukum-amin-minta-diadakan-pemilu-ulang?loc=hard_paywall. Diakses Pada 13 April 2025.

Menurut Tim Hukum AMIN, politisasi bansos ini memberikan pengaruh dan dampak terhadap kemenangan Prabowo-Gibran. Dilaporkan menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2024, menunjukkan bahwa 69% dari total 96.214.691 suara pemilih Prabowo-Gibran adalah penerima bansos, dan dilanjutkan dengan masyarakat yang tidak menerima bansos pula mereka tidak memilih Prabowo-Gibran¹⁹. Survei juga mengatakan tingkat dukungan masyarakat yang tidak menerima bansos kepada Prabowo-Gibran lebih rendah dibandingkan dengan dukungan masyarakat yang menerima bansos tersebut. Tim Hukum AMIN juga mengatakan politisasi bansos ini juga mempengaruhi tingkat hasil survei masyarakat terhadap Prabowo yang dikonfirmasi melalui hasil survei Litbang Kompas salah satunya. Namun, ketika Presiden Jokowi melakukan kampanye terselubung melalui kunjungan daerah dan membagikan bansos yang intensif, hasil survei Prabowo-Gibran meningkat hingga ke angka 58,8 persen pada Februari 2024²⁰. Beberapa ahli seperti Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) menilai potensi politisasi bansos dapat berpengaruh terhadap penyalahgunaan data penerima, penyelewengan dana, penggunaan simbol dan atribut pemilu, personifikasi kebijakan bansos, hingga mempengaruhi preferensi politik penerima bansos. Selain itu, keterlibatan lembaga kepresidenan beserta kementerian untuk ikut berkampanye juga merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo-Gibran. Bahkan, Aparat Penegak Hukum dan Aparatur Negara hingga kepala desa pun ditanyakan kembali netralitas dan kedaulatannya. Hal ini pula yang menjadi kunci atas kemenangan Prabowo-Gibran yang tidak luput dengan adanya intervensi dari pejabat negara untuk memengaruhi pilihan masyarakat Indonesia sehingga pemilu yang adil dan demokratis itu seolah sudah tiada.

¹⁹ Syafriani, E. (2024). *Tim Hukum AMIN Sebut Politisasi Bansos Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran, Apa Kata Pengamat dan Jokowi?*. <https://www.tempo.co/politik/tim-hukum-amin-sebut-politisasi-bansos-pengaruh-kemenangan-prabowo-gibran-apa-kata-pengamat-dan-jokowi--72039>. Diakses Pada 14 April 2025.

²⁰ Syafriani, E. (2024). *Tim Hukum AMIN Sebut Politisasi Bansos Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran, Apa Kata Pengamat dan Jokowi?*. <https://www.tempo.co/politik/tim-hukum-amin-sebut-politisasi-bansos-pengaruh-kemenangan-prabowo-gibran-apa-kata-pengamat-dan-jokowi--72039>. Diakses Pada 14 April 2025.

Beberapa sidang telah dilewati mulai dari Sidang Perdana Sengketa Pilpres; Sidang Pemeriksaan Perkara, yang masing-masing pemohon dan termohon memberikan keterangan dari masing-masing ahli yang mereka hadirkan; dan pada akhir sidang, majlis hakim memberikan keputusan untuk menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan keempat menteri Presiden Jokowi yang membantah semua dalil pemohon mengenai politisasi bansos; sampai kepada tahap penyerahan kesimpulan; rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang digelar secara tertutup dan memastikan tidak ada kebocoran dalam rapat; sampai akhirnya kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak secara keseluruhan permohonan pemohon dari berbagai dalil yang telah disampaikan baik dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan krusial sebagai lembaga yudisial yang diberi mandat konstitusional untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam konteks Pilpres 2024, peran ini kembali diuji ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah menggugat hasil rekapitulasi suara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses penyelesaian sengketa ini menjadi krusial dalam menjaga legitimasi dan integritas proses demokrasi di negara ini²¹. Mahkamah Konstitusi menanggapi permohonan tersebut dengan menggelar serangkaian sidang terbuka yang melibatkan pemohon, termohon (KPU), pihak terkait (paslon pemenang), serta pihak-pihak relevan seperti Bawaslu. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024, dengan argumentasi bahwa pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun yang menarik, untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Indonesia, muncul *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

²¹ Simbolon, E. Z., & Kasslim, V. (2024). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 48-54.

Kemunculan *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi dalam perkara PPHU Pilpres 2024 merupakan momen penting dalam sejarah hukum tata negara Indonesia. Menurut Mahfud MD, yang sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, fakta bahwa terdapat *dissenting opinion* dalam sengketa Pilpres 2024 menjadi catatan sejarah tersendiri, karena pada periode-periode sebelumnya, seluruh hakim Mahkamah Konstitusi cenderung menghasilkan keputusan yang bulat dalam perkara sengketa pilpres. Bagi Mahfud, ini mencerminkan dinamika baru dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi, dan menjadi penanda bahwa tidak selalu bisa mencapai mufakat dalam perkara yang sarat kepentingan dan kompleksitas hukum-politik seperti Pilpres. Sayangnya, walau *dissenting opinion* ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan fundamental antar hakim, keputusan akhir Mahkamah Konstitusi tetap berdasarkan suara mayoritas yang menolak semua permohonan. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan karena dianggap tidak beralasan hukum. Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4). Hal ini menimbulkan kritik bahwa MK gagal menjalankan fungsinya sebagai “*Guardian of the Constitution*”, karena mengabaikan potensi pelanggaran etik dan prinsip pemilu.

Pada Pilpres 2024, pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) melaporkan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 21 Maret 2024, meminta pemungutan suara ulang tanpa pasangan Prabowo-Gibran, atau setidaknya tanpa Gibran, karena mencalonkan Gibran dinilai bermasalah terkait putusan MK No. 90/PPU-XXI/2023 soal batas usia cawapres. Dua hari kemudian, pasangan Ganjar-Mahfud (GAMA) juga mengajukan gugatan serupa, menuntut pemilu ulang tanpa keikutsertaan Prabowo-Gibran. Tuntutan terkait dengan pemungutan ulang tanpa paslon 2, Prabowo-Gibran, atau setidaknya Prabowo didampingi cawapres lainnya, bukan bersama Gibran yang menunjukkan adanya permasalahan krusial di dalam Pilpres 2024, terutama terkait dengan etika politik. Etika politik meliputi norma-norma moral dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mengatur tindakan politik terkait dengan kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kewajiban. Politisi juga harus memiliki hubungan yang sehat dengan para kelompok masyarakat dan juga **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

politisi lainnya dengan cara menghindari adanya kampanye yang negatif, tidak terlibat dalam politik uang maupun kecurangan pemilu lainnya²². Namun, pada Pilpres 2024, persoalan tentang etika politik tidak diindahkan oleh Anwar Usman, eks Ketua Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Gibran selaku paslon nomor urut 02 pada Pilpres 2024. Pelanggaran kode etik terdapat beberapa pihak yang berusaha untuk memberikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu yang membahas lebih mendalam mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. Dalam uji materi yang dijalani, terdapat beberapa gugatan yang diajukan, namun hanya lima yang diterima dan dijalankan sidangnya yakni nomor 29, 51, 55, 90, dan juga 91.

Dalam pengajuan uji materi tersebut, sebagian besar meminta bahwa usia minimal kandidat capres dan cawapres dibawah 40 tahun. Namun setelah melakukan beberapa sidang pendahuluan, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membacakan gugatan tersebut. Dari kelima *judicial review* tersebut, tiga diantaranya yaitu nomor 29, 51, dan 55 dilakukan penolakan oleh MK dan dua yang lain dilakukan penerimaan oleh MK walau hanya sebagian. Penolakan yang dilakukan oleh MK adalah terkait dengan usia kandidat yang minimal berusia 35 tahun. Namun, terdapat aturan dan mekanisme baru, dimana Mahkamah Konstitusi telah terima terkait gugatan nomor 90, dimana kandidat prematur dibolehkan untuk maju dengan persyaratan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan tersebut tentunya memunculkan berbagai reaksi karena kejanggalan yang ditunjukkan, pasalnya dengan adanya peraturan baru tersebut, Gibran yang digadang-gadang akan maju sebagai pasangan calon Prabowo pada Pilpres 2024 mampu maju secara mulus melalui regulasi yang baru tersebut. Terlebih lagi, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran ikut berkontribusi di dalam pembuatan keputusan tersebut. Polemik terkait dengan keputusan tersebut menimbulkan dilaporkannya hakim konstitusi, dimana dalam hal ini MK membentuk sebuah majelis yang bernama Majelis Kehormatan Mahkamah

²² Sukron, M., & Wahjono, S. I. (2024). *Potret Etika Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres Dalam Pilpres 2024*.

Konstitusi (MKMK) dengan tujuan untuk mewedahi pelaporan yang ada. Akhirnya, Usman terbukti melakukan pelanggaran prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan juga kepantasan serta kesopanan. Sehingga, ia diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK²³.

Pelanggaran terkait dengan kode etik yang dilakukan oleh MK tentunya berdampak serius terhadap integritas dan akuntabilitas peradilan. Dalam hal ini, akuntabilitas peradilan bergantung pada nilai-nilai transparansi dan juga pengawasan. Melalui fenomena ini, Usman selaku hakim MK menunjukkan kurangnya akuntabilitas yang memunculkan kecurigaan dan juga memberikan pengaruh terhadap stabilitas politik. Hal ini terjadi karena citra peradilan terbentuk dari putusan-putusan yang berperan sebagai benteng terakhir guna menegakkan hukum dan keadilan²⁴. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023 terkait dengan batas usia pencalonan presiden yang telah diputuskan oleh Anwar Usman, tentunya hal tersebut dianggap telah melanggar prinsip imparialitas dan independensi. Hal ini tentunya melanggar kode etik kehakiman dan juga prinsip “*Nemi Judex InCause Sua*” yang artinya, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Selain itu, putusan ini juga menimbulkan kisruh publik dan juga beresiko memperkuat politik dinasti dalam demokrasi

Pengaruh Keputusan Sengketa Pilpres 2024 terhadap Persepsi Masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi

Hasil penetapan Mahkamah Konstitusi terkait penanganan pada sengketa Pilpres 2024 telah memicu berbagai reaksi dari sejumlah kalangan di masyarakat, yang menimbulkan beragam persepsi terhadap peran dan kredibilitas lembaga tersebut. Persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam konsistensi putusan, independensi lembaga, dan transparansi

²³ Muhid, H. K. (2024). Nama Gibran Jadi Disebut-sebut dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik Ketua MK dan Ketua KPU, Begini Ceritanya. *Tempo*, <https://www.tempo.co/politik/nama-gibran-jadi-disebut-sebut-dalam-kasus-pelanggaran-kode-etik-ketua-mk-dan-ketua-kpu-begini-ceritanya-89002>. Diakses 20 April 2025.

²⁴ Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50-61.

dalam proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilpres 2024 memicu ketidakpuasan masyarakat, yang didorong oleh indikasi adanya keraguan dalam kredibilitas dan integritas MK sebagai sebuah lembaga peradilan. Dengan adanya dugaan kecurangan dalam *dissenting opinion* yang disetujui oleh setidaknya 3 hakim konstitusi, berdampak pada ketidakpuasan masyarakat dan menimbulkan perpecahan di antara para pendukung pemenang dan pendukung yang kalah²⁵. Selain itu, hal ini menjadi faktor penurunan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat terhadap MK, masyarakat kerap menjadi bersikap apatis terhadap proses demokrasi.

Persepsi masyarakat terhadap MK yang ditimbulkan dari keputusan pada sengketa pilpres 2024 sangat beragam. Sebagian besar didominasi oleh kecewanya masyarakat pada Mahkamah Konstitusi atas sengketa pilpres yang terjadi. Masyarakat sipil yang menunjukkan reaksi negatif atas kecewanya dan tidak setuju atas perubahan putusan MK, didominasi oleh partai politik dan calon yang merasa dirugikan oleh perubahan tersebut. Reaksi skeptis juga muncul dari sebagian elemen masyarakat terhadap putusan ini, kelompok ini merasa bahwa putusan tersebut dipengaruhi oleh tekanan politik dari luar. Adapun kalangan masyarakat yang menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi dan percaya atas perubahan putusan yang ditetapkan oleh MK, pada kelompok masyarakat ini, mereka menganggap perubahan ini sebagai upaya melindungi nilai-nilai integritas dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan di Indonesia²⁶. Persepsi masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dalam permasalahan sengketa pilpres 2024 sangat beragam, didominasi oleh persepsi negatif dengan adanya sengketa pilpres 2024 yang diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait perubahan batas usia capres dan cawapres. Akan tetapi, adapun perbedaan pada persepsi setiap individu masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi yang beraneka ragam. Hal ini

²⁵ Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10-25.

²⁶ Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara:(Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13-13.

disebabkan karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan keyakinan yang dijalani tiap individu masing-masing.

Tanggapan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024 sangat beragam, mulai dari ada dukungan, sikap netral, dan ketidakpuasan masyarakat. Beberapa penelitian memaparkan bahwa terselenggaranya Pilpres 2024 dari awalnya sudah mendapatkan berbagai reaksi negatif sehingga proses ini bukan seperti yang diharapkan di awal masyarakat. Permasalahan yang telah diciptakan Mahkamah Konstitusi dari awal jalannya Pilpres 2024 yaitu perubahan ketentuan batas usia yang berlaku untuk capres dan cawapres yang menuai berbagai kontroversi dan tanggapan yang negatif dari masyarakat di media sosial khususnya X sehingga menggambarkan reaksi negatif masyarakat terhadap putusan tersebut²⁷. Selain itu juga pada saat proses perhitungan suara, di mana sistem Sirekap sendiri yang bermasalah dan memiliki ulasan yang lebih banyak negatif dengan faktor penyebab adanya indikasi kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Hal ini juga menekankan adanya ketidakpercayaan publik terhadap proses Pilpres yang sesuai dengan asas demokrasi.

Dalam hal ini, begitu pula dengan persepsi masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Dalam prosesnya, masyarakat selalu disuguhkan dengan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip demokrasi sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan Mahkamah Konstitusi menurun dan masyarakat tidak merasa puas terhadap Pilpres 2024²⁸. Melihat dari teori legitimasi yang merupakan kewenangan moral yang dimiliki pemimpin untuk menegakkan keputusan politik yang berdasarkan pada asas demokrasi dan pro terhadap rakyat. Penolakan terhadap permohonan sengketa Pilpres menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah kehilangan legitimasinya sebagai lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, reaksi negatif yang timbul akibat

²⁷ Hariyanti, Y., Kacung, S., & Santoso, B. (2024). Analisis Sentimen Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batasan Umur Capres Dan Cawapres Menggunakan Metode Naïve Bayes. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 517-525.

²⁸ Izzati, A. N. (2024). Analisis sentimen hasil putusan mk terkait sengketa pilpres 2024 pada media sosial x. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTI)*, 9(1), 43-50.

perbuatan Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Legitimasi berarti kewenangan yang diberikan oleh masyarakat, namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilpres 2024 yang ditolak dapat memberikan indikasi bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi yang memainkan peran sebagai institusi peradilan tertinggi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga membuka ruang dan celah untuk terjadinya manipulasi hukum di kemudian hari²⁹. Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi terhadap putusan sengketa Pilpres 2024, memberikan skeptisme terhadap jalannya pemerintahan Indonesia kedepannya. Padahal banyak sekali temuan dan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan ketika jalannya persidangan berlangsung, justru berlawanan dengan hasil keputusan yang dikeluarkan³⁰. Peran Mahkamah Konstitusi yang dinilai sebagai *Guardian of Constitution* menghilang begitu saja dengan dibacakannya putusan atas sengketa Pilpres, yang bersamaan dengan penurunan tingkat kepercayaan publik kepada lembaga pemerintah sehingga ini dapat dinilai sebagai penurunan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN

Pemilihan Presiden 2024 menjadi ujian besar bagi integritas demokrasi dan lembaga peradilan konstitusional di Indonesia. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka memicu polemik publik akibat konflik kepentingan yang nyata, terlebih karena Ketua MK saat itu memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan calon yang diuntungkan oleh putusan tersebut. Proses penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024 memperlihatkan dinamika baru dalam sejarah hukum pemilu Indonesia, khususnya dengan munculnya *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi yang mengakui

²⁹ Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10-25.

³⁰ Perludem (2024). *Kredibilitas MK Kembali Dipertanyakan Pasca Putusan Sengketa Pilpres*. <https://perludem.org/2024/04/25/perludem-kredibilitas-mk-kembali-dipertanyakan-pasca-putusan-sengketa-pilpres/>, diakses pada tanggal 18 April 2025.

adanya indikasi kuat terhadap pelanggaran etika pemilu dan potensi politisasi bantuan sosial. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengalami krisis legitimasi dan kepercayaan publik, yang ditunjukkan oleh meningkatnya persepsi negatif terhadap independensi dan netralitas lembaga ini. Masyarakat yang merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan cenderung mengalami apatisme terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi struktural dan penguatan etika kelembagaan guna memastikan independensi MK dan memperkuat pengawasan terhadap integritas lembaga peradilan konstitusional. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan pada evaluasi komprehensif terhadap mekanisme pemilihan hakim konstitusi serta reformasi institusional guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas pemilu di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Almalibari, K. T., Aziz, A., & Febriansyah, A. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1-8.
- Apriansyah, A., Marsuni, L., & Salmawati, S. (2024). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 827-845.
- Febiola, A. (2024). *Tim AMIN Kritik Bansos Jokowi Bergambar Paslon 02: Konsekuensi Jika Penguasa Ingin Berkuasa*. <https://www.tempo.co/ekonomi/tim-amin-kritik-bansos-jokowi-bergambar-paslon-02-konsekuensi-jika-penguasa-ingin-tetap-berkuasa-94276>. Diakses pada 13 April 2025.
- Firmansyah, A., dkk, (2014). *Ilmu Negara: Dalam Kajian Interdisipliner*. Yogyakarta: PT. Narasikita Publishing.
- Hariyanti, Y., Kacung, S., & Santoso, B. (2024). Analisis Sentimen Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batasan Umur Capres Dan Cawapres Menggunakan Metode Naïve Bayes. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 517-525.

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi**

- Izzati, A. N. (2024). Analisis sentimen hasil putusan mk terkait sengketa pilpres 2024 pada media sosial x. *Jurnal Teknologi Informasi Indonesia (JTII)*, 9(1), 43-50.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26.
- Laventia, F., Faizal, A., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Politik di Era Digital: Media Sosial sebagai Katalis atau Distorsi?. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 423-427.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, Diakses pada 23 Maret 2025.
- Muhid, H. K. (2024). Nama Gibran Jadi Disebut-sebut dalam Kasus Pelanggaran Kode Etik Ketua MK dan Ketua KPU, Begini Ceritanya. *Tempo*, <https://www.tempo.co/politik/nama-gibran-jadi-disebut-sebut-dalam-kasus-pelanggaran-kode-etik-ketua-mk-dan-ketua-kpu-begini-ceritanya-89002>. diakses 20 April 2025.
- Mulianto, B., & Fikri, R. (2018). Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(1), 520-532.
- Muzaki, A. F. (2024). *KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Pemenang Pilpres 2024*. <https://rumahpemilu.org/kpu-resmi-tetapkan-prabowo-gibran-sebagai-pemenang-pilpres-2024/>. Diakses pada 11 April 2025.
- Ningrum, D. I. P. (2018). Legitimasi Negara Atas Mahasiswa Dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori: Kajian Max Weber. *Jurnal Sapala*, 5(1), 1-11.
- Paradita, S. A., & Triadi, I. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara:(Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 13-13.
- Perludem (2024). *Kredibilitas MK Kembali Dipertanyakan Pasca Putusan Sengketa Pilpres*. <https://perludem.org/2024/04/25/perludem-kredibilitas-mk-kembali-dipertanyakan-pasca-putusan-sengketa-pilpres/> , diakses pada tanggal 18 April 2025.

- Purnamasari, D. D. (2024). *Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Hukum AMIN Desak Pemilu Ulang*. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/21/gugat-hasil-pilpres-ke-mk-tim-hukum-amin-minta-diadakan-pemilu-ulang?loc=hard_paywall. Diakses Pada 13 April 2025.
- Satori, D. & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Simbolon, E. Z., & Kasslim, V. (2024). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 48-54.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukron, M., & Wahjono, S. I. (2024). Potret Etika Gibran Rakabuming Raka di Debat Cawapres Dalam Pilpres 2024.
- Sulistyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik Dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10-25.
- Syafriani, E. (2024). *Tim Hukum AMIN Sebut Politisasi Bansos Pengaruhi Kemenangan Prabowo-Gibran, Apa Kata Pengamat dan Jokowi?*. <https://www.tempo.co/politik/tim-hukum-amin-sebut-politisasi-bansos-pengaruh-kemenangan-prabowo-gibran-apa-kata-pengamat-dan-jokowi--72039>. Diakses Pada 14 April 2025.
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023). *Iblam Law Review*, 4(2), 50-61.
- Wasisto, A., & Pahlevi, I. (2024). Dampak Perbedaan Partisan Terhadap Tingkat Disafeksi Politik di Media Sosial: Studi Kasus Pencalonan Gibran Rakabuming [The Impact of Partisan Difference on Political Disaffection Levels on Social Media: A Case Study of Gibran Rakabuming's Candidacy]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 15(1), 21-39.
- Wijaya, H. (2018). *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Prof. Burhan Bungin).